

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam struktur pemerintahan. Desa memegang peran vital dalam pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan public di tingkat lokal. Satu di antara elemen penting manajemen keuangan termasuk dalam kegiatan utama pemerintahan desa yang teratur dan transparan, tersaji dalam laporan keuangan desa. Laporan keuangan yang baik merupakan bagian dari indikator untuk menilai kondisi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa yang menitikberatkan pada efisiensi dan pertanggungjawaban.

Sebelum diberlakukannya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa sering kali dipandang sebagai daerah yang tertinggal dan miskin, karena selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, yang menyebabkan adanya kesenjangan antara masyarakat desa dan kota. Oleh karena itu pemerintah mulai memberikan dana desa secara bertahap, karena tanpa dana berbagai kegiatan di desa akan menghadapi kesulitan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa diharuskan untuk selalu menjalankan Pendekatan pengelolaan anggaran yang menjunjung tinggi keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi aktif, dan ketertiban administratif. Satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan adalah dengan mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan terstruktur dapat memberikan dampak positif dalam

pengambilan keputusan. Kebijakan suatu pemerintah desa baik di masa kini ataupun di masa yang akan datang (Agustina, D., Rachmawati, 2023).

Standar Akuntansi yang digunakan oleh instansi Pemerintah (SAP) menjadi pedoman dalam perancangan serta penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa. Diharapkan, penerapan SAP dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan desa menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan komprehensif. Namun, implementasi SAP di tingkat desa seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap konsep SAP, dan faktor-faktor lain.

Laporan keuangan desa yang memenuhi standar kualitas dapat tercapai melalui dukungan perangkat desa yang profesional dan berkualitas. Untuk mencapai target yang sudah ditentukan, keberadaan perangkat desa sebagai pendorong utama organisasi sangatlah penting. Supaya perangkat desa memiliki kualitas baik, diperlukan tata kelola sumber daya manusia yang efektif. Dengan adanya kepemimpinan partisipasi, serta kompetensi terbukti berpengaruh pada akuntabilitas laporan keuangan desa (Dewi and Gayatri, 2019). Aparatur pemerintahan desa yang berkualitas terkait dengan pengelolaan keuangan tentunya memiliki kualitas kinerja yang baik dalam mengelola laporan keuangan desa. Kinerja yang berkualitas merujuk pada kualitas kerja yang mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik, serta memegang tanggung jawab yang berat dalam mengimplementasikan tugas dengan posisi sebagai Perangkat Desa (Agustina, D., Rachmawati, 2023). Perangkat desa merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Mereka perlu untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi elemen-elemen yang berhubungan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan fungsi keuangan, staf desa perlu memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan tanggung jawan yang mereka pikul (Wahyuni dan Ahtikah, 2021). Sehubungan dengan hal itu, tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji pengaruh kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di tingkat pemerintah desa Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang baik untuk pemerintah wajib mempertimbangkan faktor keandalan, relevansi, kemudahan pemahaman, kemampuan untuk membandingkan informasi antar periode, serta dapat dijelaskan dan digunakan. Kualitas catatan laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memenuhi kriteria tersebut, di mana pemerintah desa diwajibkan untuk mematuhi petunjuk pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016. Pemerintah desa perlu Menyusun dokumen laporan untuk enam bulan pertama dan enam bulan terakhir serta menyiapkan laporan akuntabilitas mengenai pelaksanaan pemakaian Anggaran Pendapatan Pengeluaran Desa (APBDes). Standar Perangkat Desa , Perangkat Desa yang baik harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran atau wewenangnya dengan cara yang optimal dan efisien untuk mencapai tujuan. Kualitas perangkat desa mencerminkan kemampuan mereka dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dengan didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang mencukupi. Perangkat desa yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai tanggung jawab dan fungsi mereka, serta tantangan yang dihadapi dalam pengolahan informasi yang juga berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Hubungan antara mutu perangkat desa dan laporan keuangan desa di mana kualitas perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling optimal dan efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pragiwani, et al (2020) menunjukkan sumber daya manusia yang terampil ini akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar kualitas dan terarah. Perangkat desa seharusnya memiliki kemampuan, supaya tugas dalam merancang, melaksanakan dan mengatur organisasi dapat berlangsung dengan baik. Jika perangkat desa yang dimiliki oleh pemerintah desa memiliki kualitas yang baik, hal ini akan berakibat positif pada kualitas laporan keuangan desa. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas dapat memenuhi ciri-ciri kualitatif yang diperlukan seperti keandalan, relevansi, kemudahan pemahaman, kemampuan untuk dibandingkan, dan kegunaannya.

Keuangan desa dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pemerintahan desa. Agar bisa mencapai akuntabilitas keuangan pemerintah desa yang jelas, laporan keuangan perlu dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan setelah terlebih dahulu

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Yustin, 2020). Tujuannya tidak lain adalah untuk dijadikan sebagai landasan pada saat Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Desa, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Penataan personil kepegawaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada instansi pemerintahan desa, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dimana pada penataan personil aparatur desa seringkali tidak sesuai dengan kemampuan serta jobdesk yang tersedia, dimana seharusnya penempatan dilakukan dengan filosofi "*The Right Man On The Right Place*" yang menekankan pada prinsip ini penting diterapkan dalam arti bahwa segala sesuatu ketika ditempatkan di tempat yang sesuai dengan potensinya maka semua akan berjalan dengan baik, beda halnya dengan penempatan yang tidak sesuai dengan potensi yang seharusnya, Albert Einstein pernah berkata "Semua orang jenius. Tetapi jika anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh". Dari pepatah tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya betapa pentingnya kita dalam melakukan penempatan sesuai dengan kemampuan serta jobdesk sesuai dengan kompetensi yang ada pada setiap individu.

Penerapan (SAP) secara maksimal serta aparatur pemerintah yang terampil tentunya dapat mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Praisya Mumu et all (2023), yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia serta

implementasi dari penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan dalam hal standar kualitas laporan keuangan desa. Disamping itu, studi yang dilaksanakan oleh Sanusi Ariyanto (2020), yang menegaskan bahwa mutu laporan keuangan dari pemerintah desa dipengaruhi oleh pedoman akuntansi pemerintah, serta kemampuan sumber daya manusia yang terlibat. Hal ini menandakan bahwa aparat pemerintah yang mempunyai kompetensi untuk menyusun penyajian laporan keuangan yang tepat akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penemuan dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dania Meida (2020), yang memperoleh hasil penelitian yaitu dengan diterapkannya SAP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu laporan keuangan daerah dan kemampuan sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Dari beberapa riset yang sudah dijelaskan di atas, secara umum penyebab dari laporan keuangan yang tidak memenuhi standar yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah yang diakibatkan dari kurangnya informasi dan penerapan SAP serta belum maksimalnya pelatihan yang menunjang kerja para pengampu kepentingan pemerintah tersebut.

Peneliti memilih Kecamatan Cicalengka karena sejumlah desa telah mengalami perkembangan dari desa non-mandiri menjadi desa mandiri. Dengan adanya peralihan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian pengelolaan dan penataan manajemen desa yang baru serta pelatihan untuk para aparatur desa dalam memberikan peningkatan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Selain

dari pada itu tidak adanya sosialisasi terkait dengan penerapan SAP menjadikan salah satu penyebab mengapa kualitas dalam menyusun laporan keuangan menjadi kurang baik. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat pendidikan dan kompetensi bidang ilmu pengetahuan serta keterampilan seseorang memainkan peran penting dalam kualitas dan pemahaman tugas serta tanggung jawab, terutama dalam konteks SAP, namun informasi yang peneliti peroleh aparat desa dari Kantor Kecamatan Cicalengka belum memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Dengan demikian, kekhawatiran ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan serta pemahaman mengenai Standar Akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan beberapa faktor pendukung, seperti kualitas aparat desa dan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Tingkat Pendidikan serta pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat mempengaruhi cara laporan keuangan desa disusun dan dipresentasikan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, teridentifikasi bahwa beberapa desa di Kecamatan Cicalengka kabupaten Bandung terdapat :

1. Beberapa desa telah mengalami perubahan dari desa belum mandiri bertransformasi menjadi desa mandiri. Dengan adanya peralihan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian pengelolaan dan penataan manajemen desa yang baru serta pelatihan untuk para aparatur desa dalam memberikan peningkatan kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan
2. Tidak adanya sosialisasi terkait dengan penerapan SAP menjadikan salah satu penyebab mengapa kualitas dalam menyusun laporan keuangan menjadi kurang baik.
3. Desa belum memiliki aparatur desa yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk menjalankan tugas dan kewajiban terutama terkait dengan pembuatan Laporan Keuangan yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah kualitas Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh pada kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ?
2. Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aparatur Desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan?

3. Apakah Pengelolaan Keuangan Desa memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan desa?
4. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah Desa, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap laporan keuangan?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud Penelitian ini, untuk mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dan disusun menjadi laporan skripsi untuk memenuhi salah satu ketentuan dalam sidang sarjana Akuntansi di USB YPKP.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dampak dari kualitas aparatur desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di wilayah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
2. Untuk memahami dampak dari Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dimiliki oleh pegawai desa terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Untuk memahami dampak dari manajemen keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Desa, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap laporan keuangan desa.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi yang akan disediakan setelah penelitian selesai dilaksanakan. Manfaat tersebut memiliki karakteristik baik secara teoritis maupun praktisi. Adapun kegunaan penelitian ini didapatkan oleh penulis, sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk memperluas pengetahuan dan memperkaya wawasan serta menambah pemahaman terutama dalam bidang akuntansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, dan pemahaman mengenai Dampak kualitas Pemerintah Sumber Daya Manusia dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang di hasilkan di desa.

#### **a. Bagi Penulis**

Merupakan salah satu prasyarat untuk penyusunan skripsi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah informasi, pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam bagi penulis. Mengenai hal ilmu akuntansi pemerintah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu laporan keuangan desa.

#### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian diharapkan menjadi referensi tentang ilmu akuntansi Khususnya mengenai dampak kualitas aparatur desa terhadap mutu laporan keuangan desa serta bisa dijadikan bahan ajar perkuliahan dalam mata kuliah Akuntansi.

c. **Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pertimbangan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta sebagai tambahan informasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti dengan tema yang berkaitan dengan penelitian dan masalah yang sama.

### **1.5.2 Kegunaan Praktisi**

Bagi Pemerintah Desa dan juga Aparatur Desa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi desa dalam aspek Pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas aparatur desa dalam Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Landasan Teori ini menjelaskan tentang penjelasan terhadap variable penelitian. Definisini-definisi dalam penelitian ini yaitu :

1. **Kualitas Aparatur Pemerintah Desa**

Mutu sumber daya aparatur pemerintah desa didefinisikan sebagai kualitas kompetensi yang ada pada SDM dalam organisasi pemerintah desa. UU No.23

Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan Perubahannya pada Pasal 233 ayat 2 menyebutkan bahwa:

*“Setiap Kepala Perangkat Daerah, mutatis mutandis pejabat yang menduduki jabatan dibawahnya harus memenuhi kompetensi pemerintahan”.*

Kapabilitas pemerintahan antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keahlian atau keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, dan pengelolaan keuangan daerah. Soetrisno (2019) Kualitas sumber daya manusia meliputi Ilmu, kecakapan, dan kapabilitas yang dimiliki oleh individu yang mana dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan layanan profesional. Sebagai penggerak jalannya organisasi pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa sudah semestinya memiliki sikap profesionalisme dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

## 2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dalam manajemen administrasi keuangan desa tentunya memerlukan acuan SAP. Standar Akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai pengaturan standar akuntansi keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bagaimana laporan keuangan disusun, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi perbandingan antara laporan keuangan dari anggaran, waktu yang berbeda, dan berbagai entitas. Laporan keuangan yang bersifat umum disusun untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh banyak pemakai laporan (Adhi dan Suhardjo, 2019). Implementasi SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang mampu menyajikan

informasi keuangan yang akurat, relevan dan dapat dibandingkan bagi stakeholders, dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintahan dapat menyajikan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka mencapai pengelolaan pemerintah yang efektif (Yusmalina & Haqiqi, 2021).

### 3. Pengelolaan keuangan Desa

Manajemen keuangan desa dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari berbagai tahapan seperti proses perencanaan, implementasi, penataan, pelaporan dan petanggungjawaban keuangan desa.” Keuangan desa adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala hal yang berkaitan dengan uang dan aset yang terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab desa. Tujuan dari pengelolaan anggaran di tingkat desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan standar kehidupan, mengurangi kemiskinan, menjalankan kegiatan pembangunan desa, memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta memperkuat keterbukaan serta tanggung jawab dalam penggunaan dana desa.

### 4. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kotler & Keller (2019:156) kualitas ialah kesatuan dari karakteristik elemen dan perilaku dari barang atau jasa memiliki pengaruh dalam mencapai kebutuhan konsumen.

Kualitas laporan keuangan diartikan sebagai kemampuan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang jelas dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam

proses pengambilan keputusan, tanpa adanya kesalahan pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dianggap berkualitas apabila informasi yang disajikan mampu membantu dalam pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pengguna. Dalam akuntansi sector publik, informasi yang disajikan untuk membuat keputusan hanya terbatas pada informasi yang menitikberatkan pada dimensi keuangan. Data keuangan mengacu pada informasi yang dapat dievaluasi dengan memanfaatkan nilai uang (Kawatu, 2019). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dirilis oleh pemerintah akan sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan keputusan sejumlah pihak secara bersamaan berfungsi sebagai ukuran penilaian terhadap kapasitas Lembaga pelapor dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan di waktu yang akan datang. Laporan keuangan memiliki ciri kualitatif, yaitu : relevansi, keandalan, perbandingan yang memadai dan kemudahan untuk dipahami.

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Dalam tabel di bawah ini, terdapat studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan,	(1) sistem pencatatan keuangan	Meneliti Pengaruh Aparatur Desa	Jumlah Variabel Independen

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Kompetensi Aparatur Desa, dan Peran BPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Karangasem (Sekarrini, Ni Luh &amp; Devi Sunitha, 2024)</p>	<p>berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, (2) keterampilan pegawai desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan, (3) fungsi BPD memberikan dampak positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</p>	<p>terhadap kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>&amp; Lokasi Penelitian</p>
2	<p>Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Wahyudi Agus, &amp; Hasri Diah Anggreani, 2021)</p>	<p>Kualitas perangkat desa memiliki dampak yang positif dan substansial terhadap kualitas laporan keuangan desa, melalui keberadaan pemdes yang berkualitas, laporan keuangan</p>	<p>Menganalisis dampak kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa</p>	<p>Jumlah Variabel Independen &amp; Lokasi Penelitian</p>

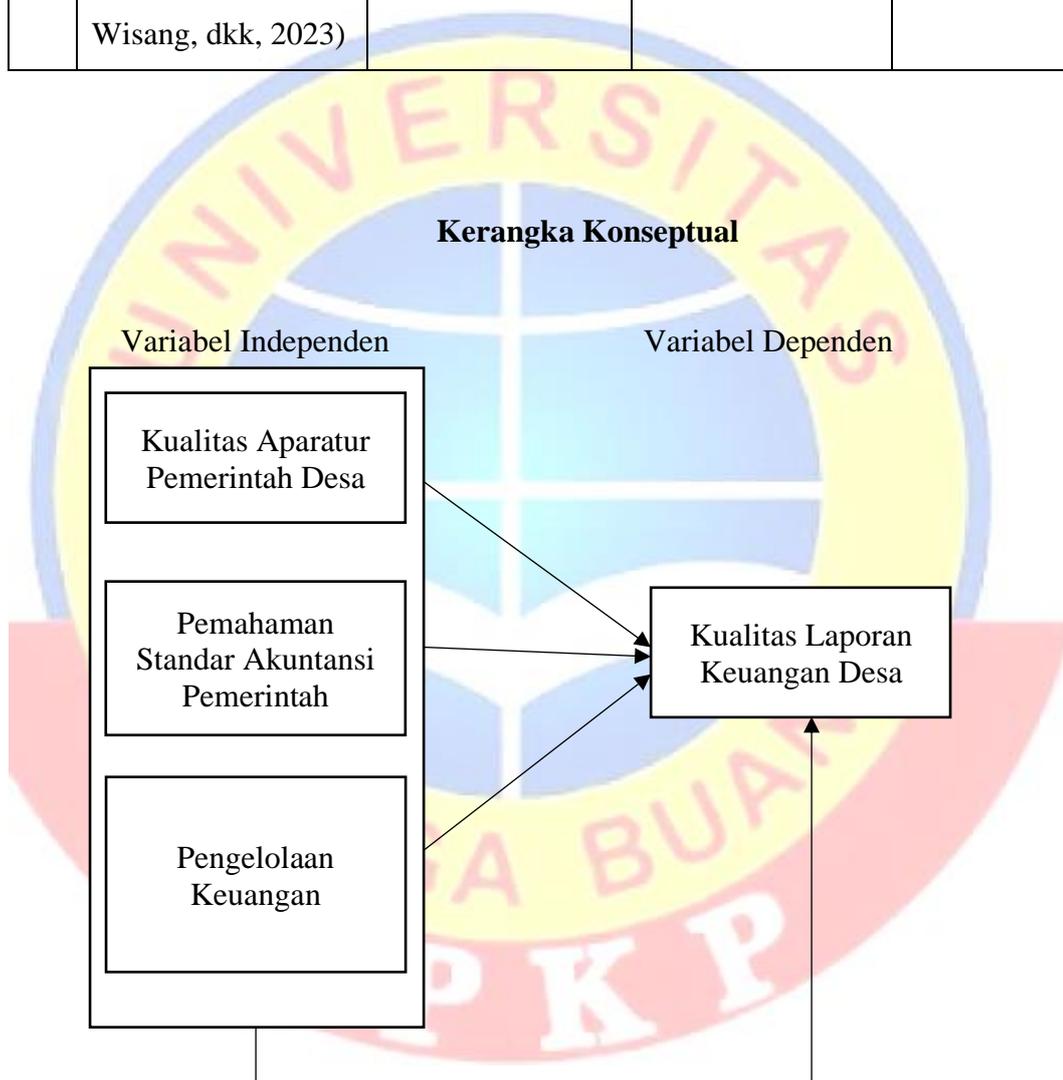
No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		yang dihasilkan akan berkualitas.		
3	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Budiarti Dini, dkk, 2021)	bahwa tingkat pendidikan dan Pengalaman Kerja secara terpisah tidak memengaruhi pemahaman laporan keuangan desa, kualitas pelatihan dan pemahaman Akuntansi secara terpisah memiliki dampak terhadap pemahaman laporan keuangan desa, serta tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi aparatur desa secara bersamaan memengaruhi pemahaman	Meneliti dampak kualitas, dan pemahaman Akuntansi Pegawai desa terhadap laporan keuangan	Jumlah Variabel Independen & Lokasi Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		laporan keuangan desa		
4	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan (Puspasari Oktaviani Sari, & Purnama Dendi, 2020)	kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan dampak penerapan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan faktor kualitas data, dukungan manajemen puncak serta kualitas sistem tidak memperkuat dampak penerapan sistem keuangan desa terhadap	Meneliti Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa	Jumlah Variabel Independen & Lokasi Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kualitas laporan keuangan pemerintah desa.		
5	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Yuneti Katharina, 2024)	kompetensi pegawai memiliki dampak terhadap kualitas laporan keuangan desa, sementara pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Disisi lain, sistem pengendalian internal memberikan efek positif pada kualitas laporan keuangan desa.	Meneliti Kompetensi Aparat desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa	Jumlah Variabel Independen & Lokasi Penelitian
6	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah,	Standar akuntansi untuk pemerintah tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan,	Meneliti Standar akuntansi pemerintah, Kualitas aparatur pemerintah	Jumlah Variabel Independen & Lokasi Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Tekanan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Opd Pemerintah Kota Magelang) (Ima Inayah Safitri, 2024)	sementara kualitas aparatur pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap laporan tersebut. Penggunaan teknologi informasi dan pengendalian internal berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, sedangkan tekanan koersif tidak berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.	daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian Intern dan tekanan koersif terhadap kualitas laporan keuangan	
7	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap	Implementasi Sistem Keuangan Desa serta kemampuan Sumber Daya Manusia	Meneliti Penerapan sistem pengelolaan keuangan desa dan kompetensi	Jumlah Variabel Independen & Lokasi Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Nita dan Desa Lusitada) (Petrus Wisang, dkk, 2023)	berdampak terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	sumber daya manusia	



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

### 1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan awal terhadap permasalahan yang diajukan, yang akan dibuktikan melalui data empiris dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternative. Hipotesis nol ( $H_0$ ), yaitu hipotesis yang akan diuji, sehingga nantinya akan diterima atau ditolak. Hipotesis nol berarti menunjukkan “tidak ada” dan biasanya dirumuskan dalam kalimat negatif. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) yaitu hipotesis yang dikemukakan selama penelitian berlangsung. Hipotesis alternatif berarti menunjukkan “ada” atau “terdapat” dan merupakan hipotesis pembandingan yang dirumuskan dalam kalimat positif. Adapun hipotesis yang peneliti ajukan dan harus di uji kebenarannya sebagai berikut :

$H_0$  : Kualitas dari pegawai pemerintah desa, Pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

$H_1$  : Kualitas aparatur pemerintah desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

$H_2$  : Pemahaman SAP mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

$H_3$  : Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

$H_4$  : Kualitas pegawai pemerintah desa, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan pengelolaan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

## **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang berjumlah 12 (dua belas) desa, terdiri atas Desa Panenjoan, Desa Tenjolaya, Desa Cicalengka Kulon, Desa Cikuya, Desa Waluya, Desa Margaasih, Desa Cicalengka Wetan, Desa Nagrog, Desa Narawita, Desa Dampit, Desa Tanjung Wangi, Desa Babakan Peuteuy.

### **1.7.2 Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan oktober 2024 hingga bulan Februari 2025. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan menjalankan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rentang waktu yang sudah disepakati oleh masing-masing Kantor Desa di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

